

ERA KEBEBALAN: PENYEBARAN PENGETAHUAN PALSU DAN KEMATIAN INTELEKTUALITAS



Penulis:

Anindya Dessi Wulansari

Penyunting:

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

Yuyun Purbokusumo, Ph.D

Proofread:

Arif Novianto

Penata Sampul dan Letak:

Wahyu Budi Utomo



Era Kebebalan: Penyebaran Pengetahuan Palsu dan Kematian Intelektualitas

Oleh: **Anindya Dessi Wulansari**

Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

Magister Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM)

Para pengguna media sosial di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan perdebatan politik. Pertarungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali membelah masyarakat ke beberapa kubu untuk saling berpolemik. Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2018 menjadi tiga peristiwa yang menjadi ajang perdebatan yang begitu riuh. Kolom-kolom media sosial seperti Twitter, Whatsapp, Facebook, dan Instagram dipenuhi oleh berbagai potongan gambar, video, atau pun kutipan dari para politisi yang kemudian dijadikan dasar perdebatan. Perang komentar dan adu argumen daring membuat suasana polarisasi semakin memanas antar kubu. Terlepas dari keragaman perspektif serta ideologi dalam perdebatan, terselip pertanyaan yang menarik: apakah perdebatan tersebut terjadi secara substantif dan komprehensif atau justru terjatuh dalam *logical fallacy* (kekeliruan logis)?

Mari kita coba periksa tentang perdebatan yang terjadi pada Pilpres 2019 kemarin yang saat ini kedua elite kubu yang saling bertarung justru saling berkoalisi. Sementara, para pendukungnya sampai saat ini justru seringkali masih tetap berpolemik untuk mencari benar.

Dalam Pilpres 2019, salah satu kubu dengan corak Islam konservatif (Pinterpolitik, 2018) yang menjadi oposisi dari petahana, membangun argumen dengan logika-logika mistika.¹ Salah satunya mereka mengkampanyekan

1 Frasa ini diadopsi dari Buku Madilog yang ditulis oleh Tan Malaka yang menjelaskan kegagalan penjelasan secara logis karena segala sesuatu dihubungkan dengan takhayul, mistis, dan lain-lain.

bahwa kubu petahana sebagai “rezim dzalim yang patut untuk di azab” karena digambarkan sebagai anti-Islam.² Untuk menarik pada kesimpulan itu, berbagai informasi yang dibangun sebagai narasi argumentatif mereka adalah tentang hutang negara yang semakin meningkat, tenaga kerja asing (TKA) China yang menduduki pasar tenaga kerja Indonesia, tindakan yang tidak berpihak pada agama islam, kriminalisasi ulama, dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya, jika ditelisik lebih dalam, narasi argumentatif untuk menjabarkan informasi di atas bersifat retorik. Tentang hutang negara contohnya, kecenderungannya memang semakin naik, akan tetapi alih-alih menganalisis tentang apa manfaat hutang tersebut bagi rakyat dan implikasi hutang itu bagi kedaulatan negara, mereka cenderung mem-*framing* hutang yang semakin meningkat sama dengan kehancuran negara. Sementara dalam hal TKA China di Indonesia, pada faktanya memang ada, akan tetapi perbandingannya masih begitu kecil jika dibanding dengan Buruh Migran Indonesia (BMI) di China dan negara lain. Jumlah TKA China di Indonesia sebesar 24.804 atau sekitar 3% dari keseluruhan BMI Indonesia dan 24 ribu diantaranya sebagai profesional (CNBC, 08/09/2018). Sementara itu, jumlah BMI di China sekitar 90.000 orang, yang artinya lebih banyak dibanding dengan TKA China di Indonesia (Kompas, 23/04/2019). Namun, isu tentang TKA China ini di *framing* untuk menciptakan ketakutan bagi para pembaca. Isu ini menopangkan diri pada rasisme yang terbangun di Indonesia atas etnis China dan juga anggapan bahwa China adalah negara komunis yang mengancam Indonesia (warisan doktrin tentang bahaya komunis) (Robinson, 2018).

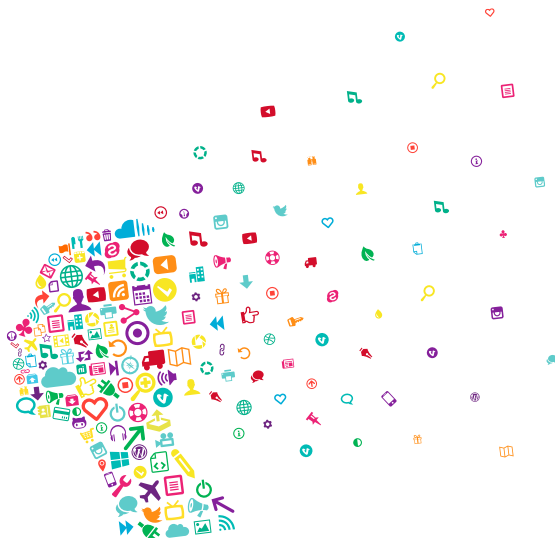
Sedangkan kubu yang lainnya dengan corak nasionalis konservatif (kubu petahana), menggunakan narasi-narasi nasionalis untuk menyerang lawan politik mereka. Kubu lawan mereka digambarkan sebagai kelompok radikal yang menjual isu agama dan mengancam pluralitas bangsa. Radikalisme tersebut, dikonotasikan secara abstrak sebagai bagian dari Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki tujuan mengis-

² Hal ini disampaikan dalam beberapa kesempatan pendukung Calon Presiden dan Wakilnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Misalnya dalam Tausiah Kerakyatan (Suaramerdeka, 31/07/2019) Ulama 212 menyampaikan bahwa Rezim Jokowi adalah dzalim dan pantas untuk diazab serta argumen oleh Amin Rais bahwa tokoh-tokoh kafir ada di sisi Jokowi (Tribun, 31/07/2019).

lamkan Indonesia dan menolak Pancasila. Dalam menghadang ancaman tersebut, mereka mengkampanyekan untuk memilih pasangan petahana.

Kedua kubu memproduksi narasi mereka masing-masing untuk menciptakan apa yang disebut sebagai *cyber troops* (pasukan siber). Masing-masing dari mereka memiliki *buzzer* politik untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Peran para *buzzer* ini telah menjadi benalu dalam demokrasi. Kebisingan yang mereka ciptakan, tidak berdasarkan kebenaran ilmiah, akan tetapi berdasarkan siapa yang membayar mereka. Kondisi itu cenderung mengarahkan mereka sebagai pemroduksi konten-konten *hoax* (kebohongan) demi mencapai tujuan politik tertentu. Mereka bahkan tidak jarang melakukan *bullying* terhadap pihak yang berseberangan dan juga menyerang sisi personal seseorang.

Pada kenyataannya, perdebatan serta adu argumen yang seringkali gagal secara komperhensif tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tapi hampir di dalam semua ranah kepakaran, misalnya kesehatan, astronomi, pertukangan, dan lain sebagainya. Orang-orang awam merasa jauh lebih tahu mengenai kandungan dan dampak vaksin terhadap anak daripada pakar kesehatan,



orang awam merasa lebih paham tentang teori-teori fisika, serta astronomi daripada ahlinya, serta merasa mengklaim lebih tahu tentang cara memperbaiki kebocoran pipa air daripada tukang pipa. Akibatnya, mereka menarik kesimpulan bahwa anak-anak tidak memerlukan vaksin, vaksin itu haram, mengimani teori *flat earth* (bumi datar), dan merasa tak perlu memanggil tukang pipa untuk urusan sepele semacam kebocoran pipa.

Setiap Orang Terbatas

Internet dan digitalisasi seringkali dijadikan kambing hitam dalam segala bentuk kebalan manusia pada abad ke-21 ini. Kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak pula sepenuhnya salah. Sebelum abad ke-21 dan sebelum kepopuleran internet, tingkat partisipasi orang terhadap berbagai jenis perdebatan termasuk politik sangat terbatas. Sejak kemunculan internet semakin masif tumbuh “pengetahuan palsu”. Gagasan terkait pengetahuan palsu dipaparkan oleh Karl Taro Greenfelds dalam *“Faking Cultural Literacy”* (2014). Dia menyatakan bahwa membaca dan mengobrol secara daring membuat orang-orang menjadi seolah-olah mengalami, melihat membaca, dan menonton. Dari hal itu kemudian orang merasa hanya perlu mengetahui dan punya pendapat, sehingga merasa mampu terlibat dalam percakapan itu. Kondisi ini kemudian yang disebut oleh Greenfield sebagai pengetahuan palsu yang merupakan model baru dari ketidaktahuan.

Tom Nichols dalam *“The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters”* (2017) membuka analisisnya dengan argumen bahwa setiap orang tak akan mampu menjadi multi-kognitif atau mengetahui segala macam topik secara universal. Nichols kemudian membedakan antara pakar, profesional, ahli, atau intelektual dengan orang awam. Seorang intelektual adalah mereka yang setidaknya memiliki empat perpaduan kriteria, yaitu pendidikan, bakat, pengalaman, dan pengakuan dari rekan sejawat. Pendidikan Bagi Nichols menjadi penting, namun kadar-



nya sebatas dasar pengakuan dari institusi bahwa seseorang telah melewati tahapan pengajaran formal terhadap bidang tertentu. Ijazah, surat pengakuan, atau lisensi setidaknya membedakan intelektual dengan penipu. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup untuk menyebut seseorang sebagai intelektual karena banyak di antara orang-orang dengan gelar pendidikan formal yang tinggi tak menonjol dibanding dengan yang lain, atau justru tak memiliki “akal sehat”. Mereka tak lebih menonjol dibanding dengan yang lain karena yang lain memiliki bakat sehingga tak hanya lebih tahu, melainkan juga mampu memaparkan dengan lebih baik, bahkan menghasilkan sesuatu yang baru. Orang-orang dengan gelar akademik yang tinggi ini kemungkinan hanya mendapatkan jalan untuk memasuki profesi tertentu, tapi keahliannya belum tentu bisa mumpuni.

Di sinilah peran pengalaman bekerja melewati batas alami tersebut. Pengalaman merupakan cara menjawab pertanyaan “*apa yang belakangan ini anda lakukan?*”. Intelektual akan terus terlibat dalam spesialisasi bidangnya meningkatkan bidang keterampilannya, belajar dari kesalahan, dan memiliki rekam jejak yang jelas (Nichols, 2017). Selain pengalaman, pengakuan dan tinjauan oleh kolega atau rekan sejawat diperlukan. Hal ini untuk menghindari bias konfirmasi atau kecenderungan mencari informasi yang hanya membenarkan apa yang kita percayai, menerima fakta yang memperkuat penjelasan yang kita sukai, dan menolak data yang menentang sesuatu yang sudah diterima sebagai kebenaran yang pasti dimiliki oleh setiap orang .

Gerald Graff 2001 dalam “*Hidden Intellectuals*” menjelaskan lebih lanjut tentang intelektual yang muncul dari “budaya penuh argumen”. Senada dengan Nichols, Graff memiliki pandangan yang serupa bahwa setiap manusia memiliki “kecerdasan laten” sehingga perlu ruang untuk mengartikulasikan sesuai dengan identitas diri mereka. Masalahnya, kebanyakan sistem pen-

dikan menganggap bahwa intelektual adalah mereka yang pandai pada sisi akademik. Budaya ini tidak dibangun secara tiba-tiba, tapi karena ada faktor historis yang melatarbelakangi.

Graff menganalisa pola keterbentukan dirinya sendiri sejak kecil dari lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, lalu mengaitkannya dengan perkembangan sosial serta temuan-temuan ahli untuk menarik kesimpulan-kesimpulannya. Salah satu faktor historis yang menyebabkan orang dipandang tak memiliki intelegensi, karena kosakata “intelektual” seringkali dinegasikan dengan sains atau matematika, padahal diantara mereka tidak mampu membangun narasi argumentatif. Merefleksikan pada temuan David Riesman dalam “*Lonely Crowd: A Study of The Changing American Character*” (1953) pada saat pasca perang Dunia II, terjadi ledakan budaya yang tercipta melalui televisi, radio, dan budaya konsumerisme lainnya hingga mengarahkan anak untuk memiliki cita-cita seperti orang lain.

Berkaca dari salah satu temuan Graff tersebut dan mengorelasikan dengan kondisi yang saat ini terjadi, ada kecenderungan di mana semua orang menganggap bahwa potongan info di media dapat menjadi rujukan. Hal ini mengakibatkan orang menganggap kemampuannya tak terbatas dan memiliki kemampuan laten yang lebih banyak. Implikasinya adalah orang-orang merasa bahwa dapat menjadi pakar dalam semua hal.

Irasionalitas Populer Melawan Ilmu Pengetahuan yang Mapan

Frasa “*The Death of Expertise*” (matinya kepakaran) yang dipaparkan oleh Nichols merujuk kepada akar dari segala kekebalan orang awam yang mengalami “Efek Dunning-Kruger”. Dunning Kruger ditemukan oleh David Dunning dan Justin Kruger dari Cornell University pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa “semakin bodoh anda, semakin yakin bahwa anda sebenarnya tidak bodoh”. Temuan utamanya bahwa “Mereka bukan hanya salah dalam menyimpulkan dan membuat pilihan, inkompetensi juga merampas

kemampuan mereka menyadari kesalahan tersebut (2017: 52).

Dongeng, takhayul, dan teori konspirasi memperparah Efek Dunning-Kruger. Dari ketiga irasionalitas tersebut, teori konspirasi bekerja lebih mumpuni dengan membuat argumen yang dipaparkan seolah-olah komperhensif dan rasional. Misalnya dongeng tentang Asal-usul Candi Prambanan yang menceritakan kisah cinta heroik seorang pria bernama Bandung Bondowoso pada Roro Jonggrang yang berakhir ironi membuat takhayul di tengah masyarakat bahwa pasangan kekasih yang bersama mengunjungi Prambanan akan berakhir dengan putus cinta. Atau mitos bahwa orang bersuku Jawa tak boleh menikah dengan yang bersuku Sunda akibat sejarah Perang Bubat. Mitos, dongeng serta takhayul semacam itu dapat dijelaskan dengan lompatan logika sederhana (hukum parsimoni) bahwa pasangan yang tumbuh dengan kondisi historis serta ekologis yang berbeda akan mem-



bentuk karakter berlainan yang cenderung memperlebar kemungkinan konflik dan perceraian (meskipun argumen ini memerlukan kajian mendalam). Masalah takhayul dan dongeng tak begitu signifikan dan kompleks daripada teori konspirasi.

Kasus lainnya pada pertengahan 2019 kemarin, yaitu pernyataan seorang ustadz bernama Baequni yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat mengenai Masjid Al Safar rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Konsep bangunan masjid yang bertema mirip segitiga tersebut dianggap menyerupai simbol illuminati, yang berakhir dengan kesimpulan bahwa “haram untuk beribadah di Masjid Al Safar”. Sebelum mengambil kesimpulan tersebut Baequni menjelaskan bahwa “Dan Dajjal mewujudkan ambisinya lewat kerja zionisme internasional dan mereka menyatu dalam tiga ranah yaitu simbol, ritual, arsitektur.” (Suarajabar, 12/06/2019). Penganut teori konspirasi dengan segera mempercayai itu, dan Ridwan Kamil kewalahan melawan argumen dengan intelektualitasnya dibidang arsitektur. Ia berupaya menyampaikan bahwa Masjid Al-Safar merupakan ekspresi dari Teori Lipat *Folding Architecture* yang menghasilkan ½ kubah, multi kubah, silinder, tradisional, poligon atau seperti segitiga (Kompas, 01/06/2016).

Contoh-contoh konspirasi di atas semakin parah ketika dikaitkan dengan sesuatu yang dipercayai seperti agama, budaya, atau bahkan berasal dari figur idola seperti yang terjadi dalam Pemilu Indonesia 2019 kemarin. Bias konfirmasi bekerja secara masif oleh para pendukung kedua kubu yang makin memperparah *logical fallacy*. Akibatnya, banyak di antara mereka tak mampu membangun argumen secara logis tentang klaim TKA China menyerbu dan menghabisi pasar tenaga kerja Indonesia, saling tuduh pada kedua kubu tentang komunisme, dan juga isu yang lain.

Teori konspirasi mudah diterima karena kisah konspirasi memuaskan hasrat heroik seseorang. Melalui propaganda TKA China, komunisme, dan PKI, para pembaca atau pendengaran terbakar hasrat heroiknya untuk melindungi bangsa, agama, suku, dan pertalian darah dari bahaya asing. Kondisi ini disebut Tom Nichols (2017) sebagai: *pertama*, kegagalan berpikir melalui logika statistik deskriptif yang membuat mereka tak mampu berdebat secara persuasif dan *kedua*, kegagalan dari pendidikan formal yang mencetak orang-orang yang tak paham sejarah serta budayanya.

Kita kembali mengambil contoh tentang polemik TKA China pada Pilpres 2019 kemarin. Arief Puyono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam Talkshow Rosi (KompasTV, 26/04/2018) mengklaim 10 juta TKA China menduduki pasar tenaga kerja Indonesia. Dengan lompatan logika sederhana, melihat kekuatan ekonomi China yang dipandang Amerika Serikat membahayakan negaranya sebagai negara adidaya hingga terjadi perang dagang maka gugurlah logika terkecil dari isu tersebut. Sedikit lebih detail data rata-rata Upah Minimum (*minimum wages*) Indonesia menempati peringkat ketiga terendah setelah Pakistan dan India pada tahun 2017 (ILO, 2017). Apalagi dibandingkan dengan China yang proporsi perbedaannya upah minimumnya sebesar empat kali lipat lebih tinggi dibanding dengan Indonesia. Jadi secara parsimoni berarti mereka gagal dalam tingkatan paling sederhana secara logika bahwa “untuk apa orang China menjadi pekerja di Indonesia jika upah minimum di Indonesia sangat rendah”. Kondisi ini akan jauh lebih baik ketika mereka melakukan kritik yang komperhensif pada petahana yang merupakan lawan politiknya mengenai upah minimum Indonesia yang rendah dengan data yang dikumpulkan secara baik.

Membangun Budaya Argumentatif

Kerumitan di atas menjadi masalah besar dan kefrustasian para intelektual karena orang-orang awam berubah menjadi orang bebal ketika mereka tak memiliki kemampuan metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan untuk menyadari kesalahan, dan mengambil jarak melihat apa yang sedang anda lakukan, menyadari bahwa anda salah melakukannya (Nichols, 2017). Kemampuan ini tak hanya dimiliki oleh intelektual, namun juga ada pada orang-orang awam yang mampu menyadari kesalahannya. Kondisi ini berbeda dengan orang-orang bebal yang tak memilikinya membuat intelektual frustrasi.

Orang-orang bebal dapat berargumen menentang ilmu pengetahuan yang telah mapan karena stereotipe yang dibangun bahwa “intelektual dapat melakukan kesalahan” lalu terjadilah bias konfirmasi, tanpa mereka melakukan generalisasi seperti halnya yang dilakukan intelektual untuk menarik kesimpulan. Mereka mencari informasi melalui internet membuat mereka merasa telah belajar tentang sesuatu, namun kenyataannya mereka tenggelam dalam data-data yang tak mereka pahami (*ibid*).

Nichols berargumen bahwa Intelektual memang tak sepenuhnya benar serta dapat melakukan kesalahan, namun kesalahan yang dibuat oleh intelektual tidaklah sama dengan kesalahan yang terus menerus dalam segala hal. Kenyataan yang terbentuk adalah bahwa intelektual lebih sering benar dibanding dengan orang awam.

Ilmuwan yang merupakan bagian dari intelektual mempelajari dan mendapatkan Ilmu pengetahuan yang telah mapan tak secara sederhana, sesederhana perdebatan di media daring. Ilmuwan melakukan penalaran atau analisis dari fakta-fakta yang diamati, diukur, dan diverifikasi. Pengumpulan data dilakukan berulang kali dan melakukan peer-review (tinjauan sejawat) lalu menggunakan *double-blind review* untuk mencegah bias pribadi dan bila perlu melakukan *peer-review* dengan argumentasi yang bertolak belakang dengan argumentasinya untuk mendapatkan kesimpulan yang mapan.

Tak hanya melalui serangkaian tahap tersebut untuk menjadi intelektual, namun kemampuan laten (Graff, 2001) terhadap bidang tertentu lalu mengasahnya kedalam argumentasi kritis menjadi penentu intelektualitas

seseorang dalam suatu bidang. Gerald Graff menemukan bahwa kemampuan membangun argumentasi tidak hanya dapat dibangun melalui sains, pemahaman tentang sejarah Revolusi Perancis, atau kemampuan akademik lainnya. Menyukai hal-hal yang dianggap menarik seperti olahraga, mengikuti perkembangan olahraga melalui majalah atau koran juga dapat membangun kemampuan berpikir kritis yang lebih luas seperti “*mengapa orang-orang pendukung klub sepak bola terjerumus dalam konflik hanya karena perlombaan?*” lalu berpikir bahwa olahraga dapat menjadi perpanjangan dari dunia sosial yang lebih luas dan orang-orang terobsesi pada “hidup dan mati” pada tim mana yang mereka pilih (Graff, 2001).

Pendidikan formal seharusnya mengajarkan seseorang untuk memiliki kemampuan metakognisi (Nichols, 2017) dan membangun budaya penuh argumentasi (Graff dan Looby, 1994: 440). Membuat suasana kegembiraan dalam mengajar melalui pendidikan kritis membuat orang mampu menimbang berbagai jenis bukti, bergerak diantara berbagai bukti yang dipaparkan orang lain, dalam generalisasi dan suatu yang spesifik, merangkum berbagai pendapat, lalu menciptakan ide (Graff, 2001). Melalui hal itu, intelektualitas akan tetap hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tom Nichols (2017) bahwa seorang yang telah belajar ilmu filsafat atau fisika minimal harus mengetahui sejarah dan budayanya sendiri. Melalui pembelajaran tersebut intelektual-intelektual yang dihasilkan akan jauh dari *logical fallacy*, karena mereka akan dapat membangun argumentasi secara komperhensif dan tak lagi ahistoris.



Daftar Pustaka

- CNBC. (2018). Tenaga Kerja Asing di RI meroket 38 terbanyak dari China. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190908075511-4-97843/tenaga-kerja-asing-di-ri-meroket-38-terbanyak-dari-china>. Pada 6 Januari 2019
- Detik. (2019). Polemik Tenaga Asing di Hutan Prabowo. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4438851/polemik-tenaga-asing-di-hutan-prabowo>. Pada 06 Januari 2019
- Graff, Gerald. (2001). Hidden Intellectualism. Duke University Press. Journal of Pedagogy, Volume 1 pp 21- 36
- Graff,Gerald,and Christopher Looby.(1994).“Gender and the Politics of Conflict Pedagogy: A Dialogue.”American LiteraryHistory6:434–52.
- ILO.(2017). Laporan Terbaru ILO: Pertumbuhan Upah Stabil tapi Tidak berimbang di Asia dan Pasifik. Diakses melalui https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_575618/lang-en/index.htm. Pada 6 Januari 2019
- Greenfiels, Karl Taro. (2014). “Faking Cultural Literacy”. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2014/05/25/opinion/sunday/faking-cultural-literacy.html>. Pada 6 Januari 2019
- Kompas. (2019). Kontroversi Masjid Al Safar di Tol Cipularang. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/06/01/04000011/kontroversi-masjid-al-safar-rancangan-ridwan-kamil-di-tol-cipularang?page=all>. Pada 06 Januari 2020
- Kompas. (2019). Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/23/154732226/ini-data-tka-di-indonesia-dan-perbandingan-dengan-tki-di-luar-negeri>. Pada 6 Januari 2019
- Malaka, Tan. (1999). Madilog: Materialisme, Dialektika, dan Logika. Jakarta: Penerbit Widjaya
- Nichols, Tom. (2017). The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters. United States: Oxford University Press
- Pinterpolitik. (2018). Pilpres 2019, Pertarungan Kanan vs Kanan. Diakses melalui <https://www.pinterpolitik.com/pilpres-2019-pertarungan-kanan-vs-kanan/>. Pada 6 Januari 2019
- Riesman, David. (1970). The Lonely Crowd: A Study Changing American Character. London: Yale University Press
- Robbinson, Geoffrey. (2018). The Killing Season: A History of The Indonesian Massacres, 1965-66. New Jersey: Princeton University Press
- Suarajabar. (2019) Polemik Desain Al Safar Ustadz Baequni Sebut Simbol Bisa Batalkan Salat. Diakses melalui <https://jabar.suara.com/read/2019/06/12/095336/polemik-desain-al-safar-ustadz-baequni-sebut-simbol-bisa-batalkan-salat>. Pada 06 Januari 2019



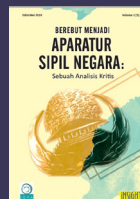
Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) adalah institusi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian serta melakukan diseminasi dan publikasi hasil penelitian di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada. IGPA merupakan upaya revitalisasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan MAP UGM yang berdiri sejak 1994.

Persoalan mengenai studi maupun pengembangan sektor publik di Indonesia dalam era kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan problem yang tidak sederhana. Rendahnya kualitas kebijakan publik, lemahnya kapasitas aparat publik, belum efektifnya kinerja organisasi publik, tantangan mewujudkan good governance, maupun kebutuhan untuk penguatan citizenship, jelas membutuhkan jawab dan solusi yang efektif sekaligus komprehensif. Oleh karena itu, IGPA didirikan dan dikembangkan dengan fokus melakukan analisis dinamika organisasi sektor public, citizenship dan governance di Indonesia. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, IGPA diharapkan mampu menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder kebijakan publik.

Publikasi Institute of Governance and Public Affairs UGM



Buku



Bulletin



Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)

Silakan kirim naskah jurnal ilmiah anda ke JKAP. Lebih jauh, kunjungi journal.ugm.ac.id/jkap

Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

Magister Administrasi Publik
FISIPOL UGM unit II
Jl. Dr. Sardjito, Sekip
Yogyakarta, 55223
Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
<http://journal.ugm.ac.id/jkap>

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta 55281
Mobile : +62813 9135 5393
Telepon : (0274) 512700 ext. 110 atau (0274) 563825; 588234
Fax : (0274) 589655
Website: igpa.map.ugm.ac.id
Instagram: [@igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)